

**PENGEMBANGAN INVESTASI DAN EKSPOR PRODUK UMKM
DALAM ERA EKONOMI DIGITAL**

**PENGEMBANGAN INVESTASI DAN EKSPOR PRODUK UMKM
DALAM ERA EKONOMI DIGITAL**

**Venti Eka Satya
Rasbin
Sony Hendra Permana
Ari Mulianta Ginting
Edmira Rivani**

**Editor:
Carunia Mulya Firdausy**

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jakarta, 2019

Judul:
Pengembangan Investasi dan Ekspor Produk UMKM
dalam Era Ekonomi Digital
Carunia Mulya Firdausy (ed.)

xiv + 152 hlm; 15,5 x 23 cm
ISBN 978-602-433-847-3

Copyright ©2019
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved

Penerbitan ini dimungkinkan atas kerja sama
Yayasan Pustaka Obor Indonesia dengan
Pusat Penelitian Badan Keahlian
Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia

Cetakan pertama: Desember 2019
YOI: 1746.38.3.2020
Desain sampul: Iksaka Banu

Yayasan Pustaka Obor Indonesia
Jl. Plaju No. 10, Jakarta 10230
T. + 62 (0)21 31926978, 31920114
F. + 62 (0)21 31924488
E-mail: yayasan_obor@cbn.net.id
<http://www.obor.or.id>

KATA PENGANTAR

*Indra Pahlevi*¹

Pertama-tama, kami menyambut gembira atas terbitnya buku dengan judul “Pengembangan Investasi dan Ekspor Produk UMKM dalam Era Ekonomi Digital” yang ditulis oleh para peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Penelitian (Puslit) DPR RI.

Buku ini terdiri dari tujuh bab, di mana dua bab merupakan bagian pendahuluan (Bab 1) dan bagian rangkuman pokok-pokok (Bab 7). Bab kedua, mengungkapkan dan membahas investasi dan sistem pengelolaan investasi oleh pemerintah. Bab ketiga mendiskusikan dan membahas investasi padat karya: perkembangan, kendala, dan solusinya. Kemudian bab keempat didiskusikan perkembangan investasi syariah dan manfaatnya bagi masyarakat. Pembahasan mengenai topik ini menjadi penting dikemukakan dalam buku ini sebagai akibat pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia yang semakin “*booming*”. Sementara bab kelima membahas tentang uraian dan pembahasan tentang perkembangan dan potensi *fintech* dan perannya pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pentingnya pembahasan terkait teknologi keuangan digital ini karena teknologi ini telah mengubah secara radikal dan mendisrupsi format perilaku kehidupan dan perekonomian hampir semua negara. Bab keenam mendiskusikan dan membahas pemanfaatan *e-commerce* dalam

1 Kepala Pusat Penelitian (Puslit), Badan Keahlian DPR RI.

mendorong kegiatan ekspor kerajinan. Seperti halnya pembahasan di Bab 5, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cepat telah menciptakan perubahan yang radikal dalam struktur perekonomian nasional. Selain perkembangan penggunaan *fintech*, perkembangan *e-commerce* tidak dapat dipungkiri juga memberikan pengaruh bagi perekonomian Indonesia.

Dengan diterbitkannya buku ini, semoga memberikan sumbangan pemikiran tentang pengembangan investasi dan ekspor produk umkm dalam era ekonomi digital di Indonesia. Dengan membaca buku ini, pengetahuan pembaca tidak saja dapat menjadi bertambah, tetapi juga semakin dalam dan tajam. Namun harus diakui bahwa informasi dan analisis yang dikemukakan dalam buku ini masih relatif terbatas sehingga memerlukan kehati-hatian dan tambahan data dan informasi serta penggunaan metode analisis lebih lanjut dalam menjustifikasi fakta dan isu yang dikemukakan di dalam buku ini.

Akhirnya, saya mengapresiasi setinggi-tingginya atas penerbitan buku ini, dan mengucapkan terima kasih kepada para peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini, serta berharap semoga di masa mendatang peneliti Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dapat menghasilkan buku-buku yang lebih berkualitas.

Jakarta, September 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
PROLOG	
Carunia Mulya Firdausy	1
BAB I	
INVESTASI DAN SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI PEMERINTAH	
Oleh: Venti Eka Satya	15
I. Pendahuluan	15
II. Investasi	17
III. Sistem Pengelolaan Investasi Pemerintah Indonesia	29
IV. Penutup	37
Daftar Pustaka	39
BAB II	
INVESTASI PADAT KARYA: PERKEMBANGAN, KENDALA, DAN SOLUSINYA	
Oleh: Rasbin	41
I. Pendahuluan	41

II.	Peranan dan Perkembangan Investasi Pada Sektor Padat Karya	44
III.	Kendala-kendala Investasi pada Sektor Padat Karya	49
IV.	Solusi Meningkatkan Investasi Padat Karya	57
V.	Penutup	60
	Daftar Pustaka	61

BAB III

INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA DAN MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT

	Oleh: Sony Hendra Permana	63
I.	Pendahuluan	63
II.	Investasi dalam Perspektif Islam	65
III.	Produk Investasi Syariah di Indonesia	69
IV.	Manfaat Investasi Syariah bagi Masyarakat	81
V.	Penutup	83
	DAFTAR PUSTAKA	85

BAB IV

PERKEMBANGAN *FINTECH PEER TO PEER (P2P) LENDING* DAN PERANNYA TERHADAP UMKM DI INDONESIA

	Oleh: Ari Mulianta Ginting	87
I.	Pendahuluan	87
II.	Perkembangan dan Potensi <i>Fintech</i> di Indonesia	91
III.	Peran <i>Fintech</i> dalam Mendukung UMKM di Indonesia	97
IV.	Penutup	105
	Daftar Pustaka	107

BAB V

PEMANFAATAN *E-COMMERCE* DALAM MENDORONG KEGIATAN EKSPOR PRODUK KERAJINAN

Oleh: Edmira Rivani	111
I. Pendahuluan	111
II. Pemahaman <i>E-Commerce</i>	114
III. Perkembangan <i>E-Commerce</i> di Indonesia	115
IV. Potensi Ekspor Produk Kerajinan Indonesia	117
V. Strategi Peningkatan Ekspor Kerajinan dengan <i>E-Commerce</i>	127
VI. Penutup	129
Daftar Pustaka	131

EPILOG	133
--------	-----

Oleh: Carunia Mulya Firdausy

INDEKS	141
TENTANG EDITOR	145
TENTANG PENULIS	147

DAFTAR TABEL

Bab II

Investasi Padat Karya: Kendala dan Solusinya

Tabel 1.	Peringkat <i>Ease of Doing Business</i> Tahun 2019	50
----------	--	----

Bab III

Investasi Syariah di Indonesia dan Manfaatnya bagi Masyarakat

Tabel 1.	Perkembangan Jumlah Deposito Pada Perbankan Syariah Indonesia Tahun 2015-2019 (dalam miliar Rupiah)	71
Tabel 2.	Kapitalisasi Pasar Bursa Efek Indonesia (dalam miliar Rupiah)	73
Tabel 3.	Perkembangan Surat Berharga Syariah Negara Tahun 2015 – 2019 (dalam miliar Rupiah)	80
Tabel 4.	Perbandingan Antara Sukuk Retail dan Sukuk Tabungan	80

Bab IV

Perkembangan *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* dan Perannya terhadap UMKM di Indonesia

Tabel 1.	Perubahan jumlah tenaga kerja, biaya usaha, omzet usaha, penjualan produk, dan keuntungan setelah mendapatkan pinjaman	103
----------	--	-----

Bab V

Pemanfaatan *E-Commerce* dalam Mendorong Kegiatan Ekspor Produk Kerajinan

Tabel 1.	Total Penjualan <i>Retail E-Commerce</i> Kawasan Asia Pasifik	112
Tabel 2.	Perkembangan Transaksi <i>E-commerce</i> Beberapa Negara Tahun 2013-2016 (USD Miliar)	116
Tabel 3.	Impor Produk Kerajinan di Pasar Dunia Menurut Negara Importir	118
Tabel 4.	Ekspor Produk Kerajinan Indonesia Menurut Negara Tujuan	120
Tabel 5.	Peluang, Hambatan, dan Tantangan Ekspor Produk Kerajinan Indonesia ke Negara Tujuan	124

DAFTAR GAMBAR

Bab I

Sistem Pengelolaan Investasi Pemerintah

- Gambar 1. Investasi Langsung dan Investasi tidak Langsung 24
- Gambar 2. Proses Keputusan Investasi 29

Bab II

Investasi Padat Karya: Kendala dan Solusinya

- Gambar 1. Perkembangan Investasi (PMA dan PMDN) Periode 2013 – 2018 43
- Gambar 2. Porsi PMA ke Tiga Sektor Ekonomi Periode 2010 – 2018 44
- Gambar 3. Porsi PMDN ke Tiga Sektor Ekonomi Periode 2010 – 2018 45
- Gambar 4. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia Periode 2013 – 2018 47
- Gambar 5. Persentase Penyerapan Tenaga Kerja oleh Tiga Sektor Ekonomi 48
- Gambar 6. Perkembangan Peringkat Logistic Performance Index 54
- Gambar 7. Perkembangan Peringkat Pasar Tenaga Kerja Negara-negara ASEAN Tahun 2018 57

BAB III

INVESTASI SYARIAH DI INDONESIA DAN MANFAATNYA BAGI MASYARAKAT

Gambar 1.	Total Aset Keuangan Syariah Terbesar di Dunia	64
Gambar 2.	Perkembangan Reksa dana Syariah di Indonesia Tahun 2014-2019	77
Gambar 3.	Perkembangan Sukuk Korporasi	79

Bab IV

Perkembangan *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* dan Perannya terhadap UMKM di Indonesia

Gambar 1.	Perkembangan Perubahan Orientasi Ekonomi	88
Gambar 2.	Tingkat Penetrasi Perbankan	92
Gambar 3.	Pemetaan Literasi dan Inklusi Keuangan di Indonesia Berdasarkan Provinsi	93
Gambar 4.	Perkembangan Jumlah Pinjaman <i>P2P Lending</i>	96
Gambar 5.	Jumlah Akumulasi Rekening <i>Borrower P2P Lending</i> Berdasarkan Provinsi Per Juli 2019	97
Gambar 6.	Perkembangan Rasio Kredit terhadap PDB di Negara ASEAN Periode tahun 1995-2018	99

PROLOG

Carunia Mulya Firdausy

Argumen Pentingnya Buku Ini

Perekonomian Indonesia menjelang awal periode kedua (2019-2024) Presiden Joko Widodo memegang kembali tampuk pemerintahan memperoleh peringatan akan terjadinya resesi global. Peringatan tersebut disampaikan Bank Dunia (2019) lewat laporannya berjudul “*Global Economic Risks and Implications for Indonesia*”.¹ Dalam laporan tersebut antara lain diungkapkan perekonomian Indonesia merupakan salah satu perekonomian yang rentan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi. Selain Indonesia, perlambatan pertumbuhan atau potensi resesi global juga diperkirakan terjadi pada perekonomian besar, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan China, maupun negara berkembang lainnya. Dari lima negara berkembang yang pada tahun 2013 diindikasikan rentan oleh *Morgan Stanley* di luar Indonesia adalah Turki, India, Afrika Selatan, dan Brasil (Kompas, 7 September 2019).

Implikasi dari kondisi di atas mendorong Bank Dunia melakukan revisi atas perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019 dari 3,5 persen menjadi 3,2 persen. Demikian pula untuk kawasan Asia dan Pasifik, pertumbuhan ekonomi diperkirakan menurun dari

1 IDN Financials, “World Bank: Indonesia’s economic growth will continue to decline”, (online), (<https://www.idnfinancials.com/news/28352/bank-indonesia-economic-growth-continue-decline>, diakses 20 Oktober 2019).

6,3 persen pada tahun 2018 menjadi 5,8 persen pada tahun 2019. Bahkan diperkirakan di kawasan ini pelambatan pertumbuhan akan terus berlanjut pada tahun 2020 dan 2021, masing-masing 5,7 persen dan 5,6 persen. Untuk Indonesia, Bank Dunia juga melakukan revisi kedua kalinya menyangkut proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2019 menjadi 5 persen dan bahkan di bawahnya sebesar 4,6 persen dari proyeksi sebelumnya 5,2 persen.² Mengapa perekonomian Indonesia diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi?

Banyak faktor yang diungkapkan sebagai penyebabnya kemungkinan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2019 dan mendatang. Berbagai faktor penyebab dimaksud secara umum dapat dikelompokkan sebagai kombinasi dua faktor internal dan eksternal. Kombinasi faktor internal dan eksternal pertama menyangkutnya lemahnya sumber pertumbuhan yang berasal dari investasi dan ekspor. *Twin evils ini* telah menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2012. Penyebab lainnya juga karena defisit belanja pemerintah yang sumber utamanya berasal dari utang luar negeri.³ Akibatnya, sumber pertumbuhan ekonomi lebih dibebankan pada konsumsi yang tidak bersifat *sustainable* untuk tidak mengatakan rapuh.

Rendahnya sumber pertumbuhan yang berasal investasi antara lain disebabkan upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif masih belum memadai. Paling tidak terdapat tiga faktor penyebab mengapa iklim investasi tidak kondusif. Ketiga faktor dimaksud meliputi 3 L yaitu *legal certainty* (kepastian hukum), *local regulation* (peraturan daerah) dan *labour rigidity* (masalah

2 Karlis Salna dan Arys Aditya, "Worlds Bank Forecasts Indonesia's Economy Growing Below 5%", (online), (<https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-09-09/world-bank-sees-indonesia-growth-below-5-amid-global-slowdown>, diakses 20 Oktober 2019)

3 Aviliani, "Optimalisasi Utang Pemerintah", *Kompas*, 14 September 2019, p. 6.

ketenagakerjaan).^{4,5} Akibat ketiga faktor tersebut, perang dagang antara Amerika dan China yang semestinya memberikan *spill over effects* positif bagi perekonomian nasional ternyata tidak terjadi.

Gelombang relokasi puluhan perusahaan dari China, Jepang dan Korea Selatan sebagai akibat perang dagang Amerika dan China tidak satupun memilih Indonesia sebagai lokasi baru. Dari 33 perusahaan China yang terdampak perang dagang tersebut tercatat 23 memilih relokasi investasi ke Vietnam, sisanya ke Kamboja, India, Malaysia, Meksiko, Serbia, dan Thailand. Pada tahun 2017, sebanyak 73 perusahaan merelokasi industri dari Cina, Jepang, dan Singapura masuk ke Vietnam sebanyak 43 perusahaan, 11 ke Philipina, dan hanya 10 ke Indonesia.⁶ Padahal, berbagai upaya telah diupayakan pemerintah untuk mempermudah investasi di Indonesia baik melalui pembangunan infrastruktur maupun melalui 16 paket kebijakan ekonomi sejak tahun 2015.

Kombinasi faktor internal dan eksternal kedua menyangkut *net-export*. Indonesia sejak tahun 2012 selalu mengalami defisit dalam neraca perdagangannya. Badan Pusat Statistik menunjukkan neraca perdagangan Indonesia pada Januari-September 2019 mengalami defisit sebesar 1,945 miliar dolar Amerika. Adapun sepanjang tahun 2018, neraca perdagangan Indonesia defisit 8,698 miliar dolar AS.⁷ Beberapa penyebab menurunnya ekspor nasional yakni melambatnya pertumbuhan ekonomi negara-negara destinasi ekspor, perang dagang China dengan Amerika, ketergantungan pada ekspor komoditas mentah, dan rendahnya daya saing. Dampak negatif defisit neraca

4 Carunia Mulya Firdausy, "Potential Financial Instruments toward Sustainable Urban Infrastructural development in Indonesia", *International Journal of Critical Infrastructures*, vol. 14, no. 4, 2018, hal. 295-310.

5 "Perbaiki Undang-Undang Penghambat", *Kompas*, 13 September 2019, hal 6.

6 A. Prasetyantoko, "Memahami Transmisi Krisis: Analisis Ekonomi". *Kompas*, 10 September 2019, hal. 1.

7 "Tuntaskan Tantangan", *Kompas*, 18 Oktober 2019. hal. 17.

perdagangan ini telah mengurangi devisa maupun fluktuasi nilai kurs rupiah terhadap dolar Amerika.

Dalam konteks daya saing, khususnya, indeks daya saing global (*Global Competitive Index-GCI*) tahun 2018 menempatkan Indonesia di peringkat 45 dari 141 negara. Peringkat ini menurun menjadi peringkat 50 pada tahun 2019. Menurunnya indeks ini disebabkan nilai kapabilitas inovasi semakin menurun menjadi 37,7. Sedangkan yang terbaik nilainya yakni dalam pilar stabilitas ekonomi dengan nilai 90. Belum lagi persoalan terkait ranking kemudahan berbisnis (*ease of doing business*) yang juga mengalami penurunan pada ranking 73 pada tahun 2019 di mana pada tahun sebelumnya berada pada ranking 71 dari 190 negara.

Menyikapi data dan fakta di atas, tidak ada jalan lain bagi Indonesia untuk melakukan reformasi struktural terhadap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi dan ekspor menjadi dua hal yang penting untuk dilakukan.⁸ Namun reformasi struktural untuk kedua sumber pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat lagi dilakukan dengan pola atau konsep lama. Dengan kata lain "*today's problems cannot be solved by yesterday's solution*". Pasalnya, karena kondisi ekonomi global dan nasional pada saat ini telah jauh berbeda. Hal ini disebabkan oleh besarnya arus perubahan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang menimbulkan revolusi industri 4.0 di satu pihak,⁹ dan semakin besarnya kecenderungan banyak negara untuk melakukan proteksi dalam perekonomian domestiknya di pihak lainnya.¹⁰

Buku ini ditujukan untuk memberikan catatan-catatan penting menyangkut informasi pengetahuan, isu, dan gagasan yang

8 Daron Acemoglo, David Laibson dan John List, *Macroeconomics*, United State: Pearson Education, Inc, 2015.

9 Tesselano Devezas, Joao Leitao dan Askar Sarygulov, *Industry 4.0*, Swiss: Springer, 2017.

10 Mari Elka Pangestu, "The Direction of the Changing Global Trade Environment", *Keynote speech*, yang disampaikan dalam The 3rd International Conference on Trade, Jakarta, 4th September 2019.

Prolog

perlu mendapatkan perhatian khususnya dalam pengembangan investasi dan ekspor kini dan ke depan. Dalam membedah potensi dan perkembangan investasi dan perdagangan diungkapkan juga bagaimana perkembangan dan pemanfaatan teknologi/ekonomi digital memberikan pengaruh terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan industri kreatif kerajinan. Secara lebih spesifik yang diungkapkan dan dianalisis dalam buku ini terkait lima topik. Pertama, membahas investasi dan sistem pengelolaan investasi pemerintah. Kedua, terkait perkembangan, kendala dan upaya mengembangkan investasi pada sektor padat karya. Ketiga, mendiskusikan perkembangan investasi syariah dan manfaatnya bagi masyarakat. Keempat, mengungkapkan perkembangan dan potensi *fintech* dan perannya pada UMKM. Kelima, mengupas tentang bagaimana pemanfaatan *e-commerce* dalam mendorong ekspor produk kerajinan.

Penulisan ke lima topik tersebut di atas tidak saja berdasarkan hasil-hasil penelitian lapangan baik yang dilakukan melalui survei kuantitatif, tetapi juga dilengkapi survei kualitatif. Survei kuantitatif dilakukan melalui pengumpulan data menggunakan instrumen daftar pertanyaan. Sedangkan survei kualitatif dilakukan dengan melakukan tinjauan lapangan di beberapa daerah yang *representative* maupun melalui wawancara mendalam maupun *Focus Group Discussion* dengan para *stakeholders* terkait dengan masing-masing topik. Selain pengumpulan data primer, penggunaan dan analisis data sekunder yang bersumber dari *web search*, pengkajian literatur dan berbagai publikasi terkait juga diungkapkan untuk menajamkan dan mengkonfirmasi temuan-temuan yang diperoleh dari data primer. Untuk menjaga kualitas isi buku ini, penelaahan oleh *blind reviewer* untuk seluruh topik dalam masing-masing bab juga dilakukan. Berikut diberikan sistematika, uraian isi buku dan pembahasan singkat dari isi masing-masing bab dalam buku ini.

Uraian Isi Buku

Buku ini secara keseluruhan terdiri dari 7 Bab. Dari ketujuh bab tersebut, dua bab merupakan bab pendahuluan (Bab 1) dan bab rangkuman pokok-pokok (Bab 7) temuan hasil penelitian yang diuraikan dan dibahas dalam 5 bab sebelumnya. Detail sistematika dari masing-masing bab sebagai berikut. Untuk Bab 1 ini diberikan pengantar tentang latar belakang mengapa investasi dan perdagangan serta perkembangan ekonomi digital penting untuk diperhatikan dalam perekonomian Indonesia.

Bab 2 mengungkapkan dan membahas investasi dan sistem pengelolaan investasi oleh pemerintah. Pentingnya perhatian terhadap investasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak saja dimaksudkan untuk mengetahui transparansi ekonomi pemerintah dalam memanfaatkan uang negara, melainkan juga untuk mengetahui kemampuan pemerintah dalam efisiensi pemanfaatan penerimaan negara.

Adapun bentuk investasi pemerintah yang dibahas dalam bab ini menyangkut investasi pemerintah pada sektor keuangan (*financial investment*). Pentingnya pembahasan jenis investasi ini didorong oleh adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50/PMK.010/2019 tentang Penambahan Investasi Pemerintah RI pada Lembaga Keuangan Internasional (LKI). Investasi pemerintah di sektor keuangan telah dilakukan tidak saja kepada *International Development Association (IDC)*, *Islamic Development Bank (IDB)* dan *International Fund for Agricultural Development (IFAD)*, melainkan juga kepada *Islamic Corporation for Development of The Private Sector* dan *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*. Investasi pada lembaga keuangan tersebut merupakan investasi aset keuangan (*Financial Asset*) yang dilakukan secara langsung dengan cara memberi saham dan surat utang.

Nilai penambahan investasi kepada *International Development Association*, misalnya, telah mencapai nilai sebesar Rp 217 miliar,

dengan rincian Rp 48,3 miliar atau Rp 3,2 juta dollar AS berupa pembayaran non tunai, dan Rp 169 miliar berupa pembayaran tunai. Nilai penambahan investasi pada *Islamic Development Bank* mencapai nilai Rp 87,216 miliar atau setara 5,814 juta dollar berupa pembayaran tunai. Nilai penambahan investasi kepada *International Fund for Agricultural Development* yakni sebesar Rp 45 miliar atau setara 3 juta dollar AS. Demikian pula kepada *Islamic Corporation for Development of The Private Sector* sebesar Rp 44,525 miliar atau setara 2,968 juta dollar AS berupa pembayaran tunai dan kepada *Asian Infrastructure Investment Bank* sebesar Rp 2,016 triliun atau setara 134,420 juta dollar AS.¹¹

Bab 3 membahas tentang investasi padat karya: perkembangan, kendala, dan solusinya. Fokus pembahasan pada investasi di sektor padat karya ini dilatarbelakangi paling tidak oleh alasan berikut. Pertama, belum optimalnya capaian hasil kebijakan dan program pemerintah dalam mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah tinggi. Padahal diketahui bahwa tanpa kontribusi investasi di sektor tersebut, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas sulit untuk dicapai.¹² Kedua, pertumbuhan dan jumlah penduduk yang tidak mungkin dapat dihambat sehingga butuh investasi baru di sektor padat karya. Dengan diciptakannya investasi di sektor-sektor padat karya, permasalahan pertumbuhan, dan penambahan jumlah penduduk dan tenaga kerja dengan segala masalah ikutannya dapat diminimalisir.

Ketiga, sektor ketenagakerjaan Indonesia juga masih dihadapkan pada masalah kualitas tenaga kerja. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), angkatan kerja per Februari 2019 mencapai 136,18 juta orang di mana hampir separuhnya lulusan

11 "Gunakan Dana APBN, Pemerintah Tambah Investasi di Sejumlah Lembaga Keuangan Internasional", (*online*), (<https://setkab.go.id/gunakan-dana-apbn-pemerintah-tambah-investasi-di-sejumlah-lembaga-keuangan-internasional/>), diakses 20 Oktober 2019).

12 INDEF, *Kajian Tengah Tahun INDEF 2019: Tantangan Investasi di Tengah Kecamuk Perang Dagang*, Jakarta: INDEF, 2010, hlm. 1.

sekolah dasar (SD), sementara lulusan perguruan tinggi hanya 13 persen. Ditilik dari lapangan pekerjaan, sebanyak 38,11 juta orang atau sekitar 29,5 persen bekerja di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Dari data ketenagakerjaan dan kualitas tenaga kerja tersebut, pengembangan sektor-sektor padat karya melalui berbagai jenis investasi merupakan strategi yang mutlak tidak dapat dihindari. Namun agar strategi, kebijakan, dan program pengembangan investasi yang dapat menyerap tenaga kerja ini berhasil baik, berbagai kendala yang menyelimuti perkembangan dan masuknya investasi di sektor padat karya harus dikurangi. Singkatnya Bab 3 ini diperuntukkan mendiskusikan dan menganalisis jawaban atas pertanyaan berikut. Pertama, apakah investasi yang masuk tersebut didominasi oleh investasi ke sektor padat karya? Kedua, seberapa besar tingkat penyerapan tenaga kerja dari investasi tersebut? Ketiga, apa kendala-kendala yang dihadapi oleh sektor padat karya dalam menarik investasi?

Bab 4 lebih memfokuskan pada perkembangan investasi syariah dan manfaatnya bagi masyarakat. Pembahasan mengenai topik ini menjadi penting dikemukakan dalam buku ini sebagai akibat pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia yang semakin "*booming*". Hal ini ditunjukkan dengan pertumbuhan aset keuangan syariah dalam beberapa tahun. Pada tahun 2016, misalnya, total aset keuangan syariah mencapai Rp 889,28 triliun atau sekitar US\$ 66,2 miliar. Nilai total aset tersebut tumbuh sebesar 29,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Alokasi nilai total aset ini terdiri dari (a) Industri perbankan syariah sebesar 41,1 persen dengan nilai sebesar Rp 365,65 triliun, (b) Sukuk negara dan sukuk korporasi sebesar 47,6 persen dengan nilai sebesar Rp 432,25 triliun, (c) Reksa dana syariah sebesar 1,7 persen dengan nilai sebesar Rp 14,91 triliun; dan (d) IKNB syariah (asuransi syariah, pembiayaan syariah, lembaga

non bank syariah lainnya) sebesar 9,6 persen dengan nilai sebesar Rp 85,48 triliun.¹³

Perkembangan aset keuangan syariah yang cukup besar ini telah menempatkan Indonesia sebagai negara dengan aset keuangan syariah terbesar nomor 8 di dunia, dengan total aset di tahun 2018 sebesar USD 82 miliar. Meskipun demikian, Indonesia masih jauh tertinggal dengan negara tetangga Malaysia, yang memiliki total aset keuangan syariah sebesar USD 491 miliar. Malaysia merupakan negara yang memiliki total aset terbesar ketiga di dunia. Sementara negara dengan aset keuangan syariah terbesar pertama adalah Iran dengan total aset sebesar USD 578 miliar, diikuti oleh Saudi Arabia dengan total aset sebesar USD 509 miliar.¹⁴

Dengan perkembangan keuangan syariah yang positif tersebut di atas dan mempertimbangkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, pembahasan tentang perkembangan keuangan syariah, produk-produk investasi syariah, dan bagaimana manfaat investasi syariah bagi masyarakat sangat menarik untuk diketahui masyarakat luas. Dengan pemahaman yang detail dan jelas tentang keuangan syariah, tidak mustahil pada saatnya Indonesia akan mampu mengalahkan Iran, Saudi Arabia, dan Malaysia dalam pengembangan ekonomi syariah.

Berbeda dengan Bab 2, 3 dan 4 di atas, Bab 5 lebih difokuskan terkait uraian dan pembahasan tentang perkembangan dan potensi *fintech* dan perannya pada UMKM. Pentingnya pembahasan terkait teknologi keuangan digital ini karena teknologi ini telah mengubah secara radikal dan mendisrupsi format perilaku kehidupan dan perekonomian hampir semua negara. Seperti apa yang dinyatakan Devezas dkk (2017):

13 Otoritas Jasa Keuangan (a), *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017, hlm. 9.

14 Dubai The Capital of Islamic Economy, Thomson Reuter, and Dinar Standar, *State of the Global Islamic Economy Report 2018/19: Islamic Economy Marks Steady Growth*, Dubai: Dubai International Financial Centre, 2018, hlm. 45.

“We have now a very different reality, strongly based on the virtual cyber-physical systems world, which carries with itself the necessity of a profound structural change of production means, trade, education, and social organization. Governments, entrepreneurs, businesses, and the ordinary people need to adapt to this “brave new world” in the scope of a new digital landscape.”

Salah satu bentuk perubahan radikal dari kehadiran teknologi digital di Indonesia yakni munculnya industri keuangan melalui teknologi finansial atau yang lebih dikenal dengan *financial technology* (*fintech*). Dampak positif dari *fintech* ini menurut Peterson K. Ozili yakni pada pengaruhnya terhadap inklusi keuangan yang menjadi masalah bagi negara berkembang selama ini. Hal ini dikarenakan konsumen dari kegiatan jasa keuangan yang ditargetkan oleh *fintech* selama ini merupakan masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap perbankan atau sering disebut sebagai *underbanked society*.¹⁵

UMKM sebagai pelaku usaha dengan persentase lebih dari 95 persen dari total pelaku usaha di Indonesia dipastikan akan terpengaruh dengan kehadiran *fintech* tersebut. Pasalnya, hampir sebagian besar UMKM masih memiliki karakteristik usaha yang lemah dalam permodalan, terbatas kapasitas usahanya, *unbankable*, rata-rata pelaku UMKM tidak memiliki *collateral* dan belum memiliki laporan keuangan yang tertata secara baik.

Dengan demikian, kehadiran *fintech* ini suka atau tidak suka akan mendisrupsi dan memberikan dampak bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, perkembangan dan potensi *fintech* dan bagaimana perannya terhadap pelaku UMKM di Indonesia dibahas dan dianalisis dalam bab ini. Diskusi dan pembahasan topik ini diharapkan menjadi masukan penting untuk memberikan pengaruh positif bagi perbaikan kebijakan dan program pengembangan *fintech* bagi pelaku UMKM.

15 Peterson K. Ozili, “Impact of digital finance on financial inclusion and stability”. *Borsa Istanbul Review*, Vol. 18, Issue 4, Desember 2018, hlm. 329-340.

Dalam Bab 6 didiskusikan tentang pemanfaatan *e-commerce* dalam mendorong kegiatan ekspor kerajinan. Seperti halnya pembahasan di Bab 5, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang cepat telah menciptakan perubahan yang radikal dalam struktur perekonomian nasional. Selain perkembangan penggunaan *fintech*, perkembangan *e-commerce* tidak dapat dipungkiri juga memberikan pengaruh bagi perekonomian Indonesia. Untuk *e-commerce* formal (seperti tokopedia, Bukalapak, dan sejenisnya), Bank Indonesia mencatat bahwa nilai transaksinya mencapai lebih dari Rp 77 triliun pada tahun 2018. Capaian tersebut meningkat 151 persen dari tahun sebelumnya.¹⁶ Menariknya, nilai transaksi tersebut hanya 2,4 persen dari total transaksi penjualan ritel.¹⁷ Dari angka tersebut McKinsey & Company dalam laporannya, memproyeksikan bahwa pada tahun 2022 nilai transaksi *e-commerce* akan meningkat lebih dari delapan kali lipat hingga mencapai Rp 778-920 triliun.^{18,19} Selain itu dari sisi penyerapan tenaga kerja, *e-commerce* mampu menyerap 4 juta pekerja dan diperkirakan akan meningkat menjadi sekitar 26 juta pada tahun 2022.

Sayangnya, sekitar 90 persen dari produk yang dijual di *e-commerce* Indonesia merupakan barang yang diimpor dari negara lain.²⁰ Setidaknya ada tiga *marketplace* besar di Indonesia yang menyediakan fasilitas bagi penjual dari China untuk menjual barangnya melalui *platform* mereka. Lazada, misalnya, memiliki

16 Wahyu Daniel, 11 Maret 2019, "Wow Transaksi *e-commerce* RI 2018 Capai Rp 77 T, Lompat 151%", (*online*), (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190311101823-37-59800/wow-transaksi-e-commerce-ri-2018-capai-rp-77-t-lompat-151>), diakses 20 Oktober 2019).

17 Daniel Poller, "Opportunities in the Indonesian *E-commerce* Sector", (*online*), (<https://israel-tarde.net/event-indonesia-2018/05-daniel-poller.pdf>), diakses 20 Oktober 2019).

18 MC Kinsey & Company, "The digital Archipelago: How Online Commerce is Driving Indonesia's economic development", August 2018, pp. 1-72, (*online*), (www.mckinsey.com/feature-insight/asia-pacific), diakses 20 Oktober 2019).

19 Kim Cohen, 2017, "Global *E-commerce* Sales, Trends and Statistics 2016", (*online*), (<https://www.remarkety.com/globalecommerce-trends-2016>), diakses pada 28 Juni 2019).

20 F. Pebrianto. "Kemenperin: 90 persen Produk *E-commerce* Indonesia Barang Impor", (*online*), (<https://bisnis.tempo.co/read/1123536/kemenperin-90persen-produk-e-commerce>), diakses 20 Oktober 2019).

platform khusus yang memungkinkan pembeli untuk membeli langsung dari *e-commerce* terbesar di China, Taobao. Fasilitas serupa juga disediakan oleh *Shopee* dengan *platform* globalnya JD.ID yang bekerja sama dengan Jindong. Selain itu *marketplace* milik BUMN yaitu Blanja.com juga memfasilitasi pembeli Indonesia untuk berbelanja di *E-Bay* Amerika Serikat melalui *platform* mereka. Bahkan tanpa fasilitas dari *marketplace* Indonesia pun, pembeli individu Indonesia dapat mengimpor produk asing secara langsung dari *platform e-commerce* asing seperti Aliexpress, Taobao, dan Banggood dari Tiongkok, Amazon dan E-Bay dari Amerika Serikat, Rakuten dan Amazon dari Jepang, serta beberapa *platform e-commerce* dari negara lain.

Memperhatikan permasalahan di atas, kehadiran *e-commerce* asing tersebut dapat menjadi kendala dan sekaligus ancaman besar bagi produsen Indonesia. Bahkan juga dapat sekaligus memengaruhi neraca perdagangan nasional. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk menggunakan *e-commerce* sebagai alat perdagangan komoditi ekspor Indonesia perlu ditingkatkan. Di antara produk-produk yang potensial untuk memanfaatkan *e-commerce* ini yakni produk kerajinan. Hal ini karena produk kerajinan asal Indonesia dapat diandalkan menjadi primadona di pasar ekspor, terutama produk anyaman dan patung serta ornamen logam. Dengan bergabung dalam bisnis *e-commerce*, pelaku UMKM produk kerajinan tidak perlu sering melakukan aktivitas promosi seperti pameran di luar negeri yang pada umumnya membutuhkan biaya yang besar. Pelaku UMKM produk kerajinan hanya perlu mendaftar pada suatu *online shopping mall* untuk memperkenalkan produknya di pasar dunia, atau bahkan dapat membangun *website* sendiri yang berfungsi sebagai *online shopping mall*.

Akhirnya, dari diskusi dan pembahasan temuan-temuan yang diungkapkan dalam bab-bab di atas, diberikan catatan-catatan penting dalam Bab 7 yang perlu mendapat perhatian khususnya bagi pemerintah dalam meningkatkan kualitas strategi, kebijakan, dan

Prolog

program yang terkait dengan investasi maupun ekspor baik dalam menyikapi potensi dan tantangan perlambatan pertumbuhan nasional maupun dalam mengoptimalkan kehadiran revolusi industri 4.0 bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi di satu pihak dan keadilan usaha bagi pelaku-pelaku UMKM di pihak lainnya.

Epilog

INVESTASI DAN EKSPOR PRODUK UMKM DALAM ERA EKONOMI DIGITAL: CATATAN AKHIR

Carunia Mulya Firdausy

I. PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia kini dan ke depan memerlukan terobosan kebijakan dan program ekonomi yang dinamis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkeadilan. Terobosan kebijakan dan program ekonomi dinamis dimaksud tidak saja dalam menyikapi peringatan yang disampaikan Bank Dunia lewat laporannya berjudul “*Global Economic Risks and Implications for Indonesia*”, tetapi juga dimaksudkan untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa terobosan kebijakan dan program yang ditetapkan tidak dapat lagi bertumpu hanya pada kekayaan sumber daya alam dan sumberdaya manusia saja, melainkan juga pada kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi untuk mengolah *resource endowments* yang dimiliki secara berkesinambungan dan berkeadilan.

Pengalaman telah menunjukkan kebijakan dan program ekonomi yang dilakukan belum mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan sebesar 7 persen selama tahun 2014-2019.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 sebesar 5,02 persen, lalu menitik turun menjadi 4,88 persen tahun 2015. Pada tahun 2016 dan 2017 pertumbuhan ekonomi berturut-turut sedikit meningkat menjadi 5,03 persen dan 5,07 persen. Selanjutnya, pada tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,15 persen. Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai 5,2 persen. Proyeksi ini berbeda dengan proyeksi kedua Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 5,0 persen. Proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang menurun ini disebabkan besarnya kemungkinan terjadinya resesi global.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2014 tersebut tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Dari berbagai faktor yang tidak dapat disebutkan satu per satu di sini, rendahnya kontribusi sumber pertumbuhan yang berasal dari investasi dan ekspor merupakan dua faktor penyebabnya. Lemahnya kedua faktor ini dalam berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional sejak tahun 2014 juga disebabkan beragam faktor baik yang terkait daya saing, ketergantungan pada komoditas bahan mentah, regulasi yang tidak mendukung, struktur industri yang rapuh, tingginya biaya produksi, tertinggalnya teknologi produksi, kualitas SDM yang rendah, perang dagang Amerika dan Cina, dan sebagainya.

Oleh karena itu, tidak ada jalan lain terobosan kebijakan dan program ekonomi kini dan ke depan harus diarahkan kepada perbaikan seluruh faktor yang menyangkut pengembangan investasi dan perdagangan khususnya ekspor nasional. Tanpa perbaikan seluruh komponen yang menyangkut investasi dan ekspor, mustahil pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebagai syarat pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan sosial tercapai.

Dari hasil temuan dan analisis yang didiskusikan dalam Bab 2 sampai Bab 6, beberapa catatan penting yang perlu diberikan perhatian dalam membangun perekonomian kini dan ke depan

diberikan berikut ini. Namun harus diakui masukan yang didiskusikan dalam bab akhir belum secara detail dan konkret dapat memecahkan segala isu, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam upaya membangun investasi dan ekspor nasional. Oleh karena itu, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan untuk memperbaiki kinerja investasi dan ekspor nasional.

II. PENGEMBANGAN INVESTASI KEUANGAN PEMERINTAH

Seperti diungkapkan di atas, investasi merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang harus menjadi perhatian serius untuk ditingkatkan. Dari berbagai jenis investasi yang mutlak penting untuk ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya yakni investasi pemerintah pada sektor keuangan. Investasi pemerintah di sektor keuangan ini dimaksudkan tidak hanya untuk memperoleh manfaat atau keuntungan ekonomi saja, tetapi juga untuk tujuan non-ekonomi lainnya.

Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas investasi pemerintah sektor keuangan sebagai berikut. Pertama, investasi pemerintah di sektor keuangan harus dilakukan dengan perencanaan yang tepat. Investasi pemerintah dalam sektor finansial ini tidak harus terbatas pada investasi langsung (*direct investment*) dan investasi tidak langsung (*indirect investment*). Pertimbangan yang harus diperhatikan paling tidak meliputi dua hal yakni *risk* dan *return* yang akan diperoleh dari investasi dimaksud. Kedua, pengelolaan investasi sektor keuangan mutlak perlu diperhatikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban maupun pengawasannya. Ketiga, untuk menyelenggarakan kewenangan operasional, Menteri Keuangan perlu membentuk Badan Investasi Pemerintah yang saat ini kewenangannya diberikan kepada BLU-PIP dan PT. SNI.

III. PENGEMBANGAN INVESTASI SEKTOR PADAT KARYA

Investasi di sektor padat karya ditemukan masih terbatas. Kondisi ini berdampak serius terhadap tingkat penyerapan tenaga kerja. Penyebab investasi sektor padat karya terbatas disebabkan iklim investasi yang belum kondusif, regulasi yang berbelit, penyelesaian sengketa yang lama, mahal dalam memulai bisnis, mahal dalam melakukan kegiatan ekspor dan impor, kompleksitas sistem perpajakan, dan aturan tenaga kerja yang kaku. Masalah penghambat masuknya investasi sering dikelompokkan dalam 3 L yaitu *legal certainty*, *local regulation* dan *labour rigidity*. Oleh karena itu, beberapa upaya berikut ini perlu dilakukan oleh Pemerintah agar investasi sektor riil dapat masuk dan berkembang di Indonesia.

Pertama, pemerintah perlu memberikan kemudahan akses lahan untuk investor. Hal ini misalnya dengan memudahkan perizinan untuk mengakses lahan secara cepat dengan biaya yang kompetitif. Kedua, melakukan pembenahan sistem ketenagakerjaan. Hal ini karena sistem tenaga kerja merupakan salah satu faktor di mana Indonesia mengalami ketertinggalan dari India, Malaysia, Filipina, dan Thailand. Ketiga, melakukan pembenahan sistem perpajakan. Hal ini karena semakin kompleks sistem perpajakan maka semakin rendah minat/keputusan investor menanamkan modalnya ke dalam negeri, begitu sebaliknya. Untuk mengurangi kompleksitas perpajakan, reformasi perpajakan yang sudah dimulai beberapa tahun terakhir hendaknya mulai menysasar untuk pembenahan sistem perpajakan internasional. Perubahan sistem perpajakan dapat dimulai dengan deregulasi peraturan-peraturan yang masih menghambat dalam sistem perpajakan.

Keempat, perlu peningkatan iklim investasi itu sendiri. Kondisi iklim investasi yang kondusif salah satu indikatornya adalah persaingan usaha. Persaingan usaha akan menjadi insentif bagi investor untuk mengembangkan usahanya dengan melakukan investasi. Untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat,

pemerintah harus melakukan revisi terhadap UU No 5 Tahun 1999 Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Revisi ini bertujuan untuk meningkatkan performa penegakan persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Kelima, pemerintah perlu memberikan fasilitas dan peningkatan kualitas dan kuantitas promosi investasi. Hal ini, misalnya, dapat dilakukan dengan menawarkan berbagai insentif mulai dari kemudahan perizinan sampai insentif fiskal. Bagi investor asing, pemerintah harus menawarkan berbagai fasilitas investasi yang tidak ditawarkan oleh negara-negara lain. Selain itu, promosi investasi perlu lebih digencarkan di berbagai negara. Optimalisasi peran para wakil pemerintah di luar negeri juga diperlukan dalam rangka mempromosikan investasi.

IV. PENGEMBANGAN INVESTASI SYARIAH

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia dapat menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, investasi syariah ini mutlak harus didorong. Investasi-investasi syariah yang dapat dipilih oleh masyarakat antara lain deposito syariah, pasar modal syariah, reksa dana syariah, dan sukuk. Investasi syariah ini akan memberikan keuntungan tidak hanya kepada masyarakat yang memiliki kelebihan dana saja (investor) berupa keuntungan, tetapi juga kepada masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha.

Namun karena perkembangan produk investasi syariah di Indonesia relatif masih sangat kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan produk investasi konvensional, maka kesadaran masyarakat akan keuangan syariah perlu ditumbuhkan. Apalagi Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Untuk itu pemerintah maupun otoritas terkait perlu melakukan sosialisasi yang massif kepada masyarakat terkait keuangan syariah di Indonesia.

V. PENGEMBANGAN *FINTECH* PRODUK UMKM

Pengembangan *financial technology* atau disingkat *fintech* di Indonesia dan negara berkembang akan terus mengalami peningkatan. Beberapa faktor yang mendorong berkembangnya *fintech* antara lain: (1) penduduk usia muda yang memiliki akses terhadap *mobile device*; (2) kurang lebih 60 persen dari penduduk dunia akan beralokasi di Asia pada tahun 2030; (3) inefisiensi keuangan dan pasar modal dalam menciptakan peluang pada kegiatan informal; (4) kurangnya infrastruktur fisik dari perbankan; (5) kecenderungan perilaku yang mementingkan kepraktisan dari pada perjanjian; (6) peluang pasar yang belum tersentuh dan (7) perlindungan data dan persaingan yang kurang ketat.

Dengan adanya perkembangan *fintech* tersebut, pelaku UMKM dapat memanfaatkan *fintech* untuk mengakses permodalan bagi pengembangan usaha UMKM. Hal ini dikarenakan hampir sebagian besar pelaku usaha UMKM *unbankable*, tidak memiliki *collateral* dan belum memiliki laporan keuangan yang tertata secara baik. Namun untuk mengoptimalkan kehadiran *fintech* tersebut diperlukan beberapa kebijakan lanjutan. Di antara berbagai kebijakan lanjutan dimaksud, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus lebih mengeluarkan kebijakan yang lebih komprehensif termasuk mengusulkan rancangan undang-undang tentang *fintech* bagi terciptanya iklim yang kondusif bagi pengembangan dan dukungan terhadap sektor UMKM. Dengan adanya kebijakan OJK ini kehadiran *fintech* diharapkan memberikan kemanfaatan bagi UMKM.

VI. PENGEMBANGAN *E-COMMERCE* EKSPOR PRODUK UMKM

Perkembangan *e-commerce* yang pesat di era kini telah banyak mengubah pola belanja masyarakat dari yang awalnya menggunakan cara konvensional menjadi perbelanjaan dengan melakukan transaksi secara digital. Untuk itu, penting adanya penguatan sektor ekonomi dengan memanfaatkan teknologi digital. Kolaborasi antara usaha

produk ekspor seperti kerajinan dengan *e-commerce* menjadi kekuatan tersendiri bagi perekonomian, baik secara lokal maupun global.

Dari sisi inovasi dan pengembangan produk, teknologi digital juga semakin memberi kemudahan bagi para pelaku usaha. Produsen dapat menjajagi karakter dan selera konsumennya dengan memanfaatkan teknologi digital ini. Selain itu, produsen bahkan dapat langsung meminta masukan dari konsumen terkait pengembangan produknya. Proses untuk memberikan *feedback* atau masukan sebagai evaluasi produk yang telah digunakan konsumen juga bisa dilakukan dengan lebih mudah.

Berbagai teknologi digital yang termanfaatkan dengan baik memang dapat menjadi sarana untuk meningkatkan ekspor. Dari sisi pasar dan produk, pihak yang lebih banyak memanfaatkannya secara umum adalah pelaku usaha, baik itu dalam ranah perindustrian maupun perdagangan. Di sisi lain, negara juga dapat mengambil perannya dalam menetapkan strategi ekspornya melalui pemaksimalan konsep *e-commerce* ini.

Namun karena produk yang dijual melalui *e-commerce* masih dominan merupakan barang yang diimpor dari negara lain, maka perlu kebijakan untuk menciptakan keadilan antara transaksi jual beli dalam negeri dan transaksi impor serta melindungi penjual lokal. Kebijakan dimaksud dapat berupa penetapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen untuk semua nilai transaksi tanpa ada batas minimum.

Demikian pula, untuk mengerem laju impor melalui *e-commerce* yang tumbuh pesat dalam rangka memproteksi penjual dalam negeri, selayaknya pemerintah menerapkan kuota atau batas akumulasi nilai impor dalam setahun. Hal ini juga untuk menghindari praktik memecah transaksi menjadi beberapa *invoice* (*split shipment*). Ini berarti revisi atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 12 tahun 2018 Tentang Perubahan atas PMK 182 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman mutlak diperlukan.

INDEKS

A

Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, 32, 34, 46, 81
angkatan kerja, 7, 42
anyaman, 12, 113, 123, 127
aset keuangan, 6, 8, 15, 30, 63

B

bahan baku, 54, 117, 126
bonus demografi, 49
branding, 124, 125, 126, 127

C

collateral, 10, 89, 102, 138

D

daya saing, 3, 4, 57, 124, 125, 126,
127, 134
daya tarik, 51, 57, 58, 129
deposito syariah, 69, 70, 84, 137
digital, 5, 6, 9, 10, 88, 101, 115, 129,
130, 138, 139
direct investment, 22, 38, 135
disinsentif, 58, 59

E

ease of doing business, 4, 50, 51, 53,
56
e-commerce Indonesia, 11, 114, 115
efek Syariah, 72, 74, 75, 76, 77, 78
ekonomi kreatif, 87, 91
ekspor andalan, 123

F

financial inclusion, 102
financial investment, 6, 18, 20, 37
financial technology, 10, 88, 138

H

halal, 81, 82, 84, 126
handmade, 124

I

iklim investasi, 2, 49, 51, 53, 57, 59,
60, 136
imbang hasil, 81
impor, 11, 12, 54, 55, 118, 122, 123,
124, 127, 136, 139
indeks *ease of doing business*, 51
indeks inklusi keuangan, 93
indeks kinerja investasi, 55
indirect investment, 22, 23, 38, 135

Indeks

inklusi keuangan, 93, 94
inovasi, 4, 69, 101, 130, 133, 139
insentif fiskal, 59, 137
insentif pajak, 59
investasi non-permanen, 35, 36
investasi pemerintah, 6, 16, 17, 29,
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
135
investasi permanen, 35, 36, 37, 38
investasi syariah, 8, 9, 65, 69, 81, 82,
83, 84, 137
investor, 18, 20, 23, 24, 26, 27, 28,
38, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59,
60, 66, 69, 70, 73, 80, 81, 84, 136,
137
Islam, 66, 67, 70, 82, 83

K

kapitalisasi, 73
kelembagaan, 49, 51, 60
kepastian hukum, 2
kerajinan, 5, 11, 12, 111, 113, 117,
118, 120, 122, 123, 124, 125,
126, 127, 128, 129, 130, 139
ketenagakerjaan, 3, 7, 8, 42, 58, 60,
117, 136
keuangan syariah, 8, 9, 63, 64, 65,
81, 83, 84, 137
keunggulan komparatif, 54
kompetitif, 57, 58, 60, 102, 106, 129,
136
konduktif, 2, 57, 59, 60, 124, 136, 138
konsumen, 10, 88, 105, 112, 114,
124, 125, 126, 127, 129, 130,
139

L

lahan, 57, 58, 60, 136
lapangan kerja, 7, 41, 46, 48, 49, 72,

122

lingkungan bisnis, 49
literasi keuangan, 92, 93
logistic performance index, 54
logistik, 54, 60

M

mix method, 90

N

nilai tambah, 7, 41, 46

O

online shopping mall, 12, 113, 128
overregulated, 100

P

pajak, 21, 27, 55, 56, 59, 139
pasar modal syariah, 71, 72, 73, 84,
137
pasar tenaga kerja, 56, 57
patung, 12, 113, 127
paying taxes, 50, 55, 56
peer to peer lending, 90, 94
penanaman modal asing, 43
penanaman modal dalam negeri, 43
pendapatan per kapita, 53
penegakan hukum, 51, 52
peraturan daerah, 2, 51, 52
perizinan, 52, 53, 58, 59, 136, 137
persaingan usaha, 59, 136, 137
pertumbuhan ekonomi, 1, 2, 3, 4, 7,
16, 17, 37, 41, 46, 49, 60, 83, 84,
115, 133, 134, 135, 137
platform fintech, 99
portofolio, 23, 27, 28, 33, 74, 76, 77

Indeks

prinsip syariah, 67, 69, 72, 74, 75, 81, 83
produk domestik bruto, 46, 98
produktivitas, 22, 57, 58, 83, 84
pro-growth, 41
promosi investasi, 59, 60, 137

R

rantai birokrasi, 52
real investment, 18, 20, 37
reformasi perpajakan, 59, 136
reksa dana syariah, 8, 63, 73, 74, 75, 76, 77, 84, 137
retail, 111, 112
return, 16, 24, 25, 26, 28, 31, 37, 38, 74, 135
riba, 65, 67, 72, 81, 82, 84
rigidity, 2, 56, 136
risk, 26, 38, 104, 133, 135

S

SBSN, 79, 80, 81
sektor manufaktur, 41, 46, 57
sektor padat karya, 5, 7, 8, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 51, 60, 136
sektor primer, 44, 45, 46, 47, 48
sektor sekunder, 44, 45, 46, 48, 49
sektor tersier, 44, 45, 46, 47, 48

sengketa, 32, 51, 52, 136
setengah pengangguran, 42
starting a business, 50, 53
Sukuk negara, 8, 63, 78, 79

T

tenaga kerja informal, 42
tenaga kerja paruh waktu, 42
tingkat pengangguran, 41, 42, 49
tingkat pengangguran terbuka, 42
tingkat pengembalian, 26, 49
tingkat risiko, 28
trading across borders, 50, 54, 55

U

unbankable, 10, 89, 100, 138
undang-undang, 105, 106, 138
underbanked society, 10, 89
upah, 58, 124
usaha kecil, 97, 98, 113

W

website, 12, 113, 128
World Bank, 51, 91

TENTANG EDITOR

Prof. Carunia Mulya Firdausy, MADE, Ph. D., APU. adalah Profesor Riset Bidang Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan (LIPI) dan Guru Besar Ilmu Ekonomi Universitas Tarumanagara (UNTAR). Lahir di Jakarta pada tanggal 30 Desember 1957. Gelar Sarjana diperoleh dari Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor (IPB) pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan ke jenjang *Master Degree* di bidang Agricultural Development Economics (MADE) dari Australian National University, Canberra, Australia pada tahun 1986. Kemudian meraih Ph.D bidang Ilmu Ekonomi dari *University of Queensland*, St. Lucia, Brisbane-Australia pada tahun 1992. Tahun 1995-1996, menjadi Staf Ahli Khusus Menteri Sekretaris Negara dalam pembuatan materi Pidato Presiden RI bidang Ekonomi. Kemudian tahun 1997-2001 menjadi Kepala Pusat Penelitian Ekonomi-LIPI. Tahun 2001-2002 menjadi Staf Ahli bidang Ekonomi, Dewan Ketahanan Nasional. Tahun 2005-2010 menjadi Deputy Menteri Riset dan Teknologi (Ristek) pada Bidang Dinamika Masyarakat dan *President of Non-Align Movement for Science and Technology* (NAM), serta *Chairman of ASEAN Committee on Science and Technology* (ASEAN-COST).

Pengabdianannya dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Ekonomi mencakup antara lain: (a) penelitian dalam bidang ekonomi pembangunan, makro ekonomi dan ekonomi internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); (b) Konsultan penelitian *Asian Development Bank* (ADB), *United Nations for Economic and Social for Asia and Pacific* (UN-ESCAP), *International Labour Organization* (ILO), UNDP, UNCTAD, UNSFIR, ISEAS, ISIS dan *World Bank*; (c)

Tentang Editor

Dosen dan pembimbing mahasiswa program S-1, S-2, dan S-3, untuk mahasiswa di beberapa Universitas seperti UI, IPB, UNPAD, dan UNTAR; (d) Mitra Bestari Buletin Ilmiah Perdagangan, Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik, Sekretariat Jenderal DPR-RI dan Jurnal Standarisasi, BSN; (e) Redaktur Jurnal Ekonomi UNTAR dan Jurnal Ekonomi dan Pembangunan LIPI; (f) sejak tahun 2008 menjadi *Editorial Member of Journal of Social and Economic Science, International Journal of Development Research and Quantitative Techniques* dan *International Journal of Economics and Business Studies*, New York, USA; (g) Editor dari berbagai Jurnal Ekonomi; (h) Penyunting dari berbagai buku dan prosiding bertemakan ekonomi; dan (i) *Coordinator East Asian Development Network* (EADN) untuk Indonesia dan anggota *Think Tank Asian Development Bank* (ADB) sejak tahun 2010. Berbagai karya ilmiah baik dalam bentuk jurnal telah diterbitkan antara lain dalam *Review of Asian Development Bank* (ADB), *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, *Institute for Southeast Asian Studies* (ISEAS), ILO dan UN ESCAP. Demikian pula dengan buku hasil penelitian yang diterbitkan oleh UN ESCAP, ILO, UNSFIR, UNDP, ADB, serta penerbit internasional lainnya. Alamat email yang dapat dihubungi adalah cmfirdausy@gmail.com dan carunia_firdausy@yahoo.com.

TENTANG PENULIS

Rasbin, menyelesaikan pendidikan sarjana di Institut Pertanian Bogor Jurusan Teknologi Industri Pertanian pada tahun 2005. Gelar Magister Sains Ekonomi diperoleh dari Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia dengan kekhususan Ekonomi Moneter dan Perbankan pada tahun 2008. Penulis pernah terlibat dalam beberapa proyek penelitian di lingkungan Universitas Indonesia sebagai asisten peneliti dan *research fellow* di Direktorat Internasional, Bank Indonesia. Penulis juga aktif sebagai asisten dosen di Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi dan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik Universitas Indonesia juga sebagai dosen tidak tetap di Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Saat ini Penulis merupakan peneliti muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di lingkungan Badan Keahlian DPR RI. Saat ini Penulis juga terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Tahun 2016, penulis juga terlibat dalam penyusunan RUU tentang Bank Indonesia dan terlibat dalam pembahasan UU Tentang Pengampunan Pajak. Adapun beberapa tulisan yang pernah dibuat oleh Penulis antara lain: Hubungan Kausal Dinamis Antarvariabel Makroekonomi di Indonesia dalam Kajian Krisis Ekonomi sebagai Kejutan Eksternal, Indikator Kualitas Pertumbuhan Ekonomi: Pertumbuhan Sektor Industri dan Penyerapan Tenaga Kerja, Analisis *Shocks* Kebijakan Moneter dalam Perekonomian Terbuka: Kasus Dua Sektor Ekonomi di Indonesia, Ekspektasi Potensi *Underground Economy* di Indonesia, Faktor-faktor

Tentang Penulis

yang Mempengaruhi *Non Performing Loans* Sektor-sektor Ekonomi di Indonesia, *Factors Affecting The Community Welfare of Seven Expanded Provinces in Indonesia*, Strategi Antisipasi Efek Krisis Ekonomi terhadap Perekonomian Indonesia, Analisis Pengaruh Kredit Sektoral, Suku Bunga Kredit, dan Tenaga Kerja terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektoral di Indonesia tahun 2005-2010: Pendekatan Panel Data, Gejala Deindustrialisasi dan Dampaknya terhadap Perekonomian Indonesia, Lembaga Keuangan Mikro sebagai Upaya Peningkatan Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam Pembangunan Nasional, dan Subsidi dan Upaya Peningkatan Daya Saing Ekspor Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Penulis dapat dihubungi melalui alamat e-mail: rasbin@yahoo.co.id.

Venti Eka Satya, menyelesaikan studi S-1 pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Andalas dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada. Pernah mengajar di beberapa perguruan tinggi dan sejak tahun 2009 bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa topik penelitian yang telah dilakukan di antaranya, Optimalisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak, Kesiapan Sektor Industri Agro Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015, serta Korupsi dan KPK dalam Perspektif Hukum, Ekonomi, dan Sosial. Karya tulis ilmiah penulis jugatelah dipublikasikan di beberapa jurnal dan dalam bentuk buku. Sebagai bagian dari *supporting system* Dewan, penulis juga terlibat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kedewanan. Penulis menjadi tim analis keuangan negara yang menganalisa hasil audit BPK di Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), mendampingi Tim Pengawas Kasus Bank Century, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Kepariwisata, dan lain-lain sebagainya. Penulis dapat dihubungi melalui email: venti.eka@dpr.go.id.

Tentang Penulis

Sony Hendra Permana, adalah Peneliti Muda bidang ekonomi dan kebijakan publik di P3DI Setjen DPR. Menyelesaikan studi S-1 di Universitas Persada Indonesia YAI dan S-2 di Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Kepakarannya adalah Ekonomi Terapan. Tulisan yang pernah diterbitkan dalam jurnal dan buku antara lain berjudul: “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”, “Peran Perusahaan Modal Ventura Bagi UMKM di Indonesia”, dan “Problematika dan Upaya Optimalisasi Pajak Daerah”. Mulai tahun 2011 sampai saat ini, penulis terlibat aktif dalam pembahasan RUU yang terkait dengan keuangan dan perbankan. Penulis dapat dihubungi di sony_hendra@yahoo.com.

Ari Mulianta Ginting, adalah Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan bidang konsentrasi Ekonomi Terapan. Lahir di Jakarta, 2 Mei 1981. Pendidikan Sarjana Manajemen Keuangan diselesaikan di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2006. Magister Ilmu Ekonomi diperoleh dari Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan kekhususan Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi Ilmu Ekonomi Moneter. Bekerja di Sekertariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Muda Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik dengan konsentrasi kepakaran Ekonomi Terapan pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Tahun 2015 penulis terlibat bersama dengan Biro Perancang Undang-Undang dalam penyusunan RUU tentang Bank Indonesia. Penulis juga terlibat dalam penelitian kelompok Tim Ekonomi dan Kebijakan Publik, dengan berbagai topik di antaranya tahun 2015, penulis ikut dalam penelitian Pengaruh strategi kebijakan pengendalian inflasi di daerah pasca kebijakan baru subsidi bahan bakar minyak (Studi Kasus di Provinsi D.I. Yogyakarta dan Papua Barat). Tahun 2016 penulis terlibat penelitian kelompok dengan Topik Ekonomi Kreatif serta pada tahun yang sama melakukan penelitian individu

dengan topik yang berkaitan dengan pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi. Penulis juga bekerja sebagai dosen honorer untuk Program Studi Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan dan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta. Penulis juga menjadi dosen tidak tetap untuk mata kuliah Pengantar Mikro di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pelita Harapan (UPH). Penulis dapat dihubungi melalui alamat *e-mail* : ari.ginting@dpr.go.id

Edmira Rivani, menyelesaikan studi S-1 pada jurusan Statistika – Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran, dan melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana (S-2) pada Jurusan Statistika Terapan-Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Padjadjaran. Bekerja di Sekretariat Jenderal DPR RI mulai tahun 2009 sebagai Peneliti Ekonomi dan Kebijakan Publik di Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI). Tahun 2011 penulis terlibat dalam penyusunan dan pembahasan RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat, kemudian pada tahun 2015 penulis terlibat dalam penyusunan RUU tentang Minyak dan Gas. Beberapa topik penelitian tentang ekonomi dan kebijakan publik telah dilakukan penulis seperti: Kebijakan Sektor Pertanian dan Pemberdayaan Petani, Pembiayaan dalam Perumahan Rakyat: Studi Implementasi Rancangan Undang-Undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat, Pembentukan Kawasan Pariwisata Khusus dalam Rangka Meningkatkan Kinerja Pariwisata Nasional, Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Daerah Otonomi Baru, Strategi Kebijakan Pengendalian Inflasi di Daerah Pasca Kebijakan Baru Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), dan lain-lain. Penulis juga menghasilkan beberapa karya tulis ilmiah tentang ekonomi dan kebijakan publik telah dihasilkan seperti: Perubahan Struktur Ekonomi Tenaga Kerja dan Analisis *Multidimensional Scaling* (MDS) Dalam Mengelompokkan Penyerapan Tenaga Kerja di Berbagai Provinsi (2014), Peningkatan

Tentang Penulis

Daya Saing Industri Indonesia dalam Menghadapi ASEAN *China Free Trade Area* (2015), Peran Sektor Pertanian dalam Pembangunan Berkelanjutan (2015), dan lain-lain. Penulis dapat dihubungi melalui *e-mail*: edmira.rivani@dpr.go.id atau rif_green@yahoo.com.